

GBS (Gender Budget Statement) Inspektorat Kota Bukittinggi

Nama SKPD	: Inspektorat
Tahun Anggaran	: 2020
Program	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Tujuan	Meningkatkan jumlah SKPD yang mendukung PPRG
Capaian	28 SKPD pada Pemerintah Kota Bukittinggi telah mendukung PPRG
Kegiatan	Pengawasan PPRG
Kode Kegiatan	
Analisis Situasi	<p>Pelaksanaan Pengawasan PPRG merupakan amanat dari Permendagri 67 Tahun 2011 yang merupakan Perubahan atas Permendagri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, oleh sebab itu perlu pengintegrasian gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini Inspektorat diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG baik berupa evaluasi maupun review PPRG.</p> <p><u>Data Umum</u> Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi 128.783 Jiwa dengan komposisi Kelompok Umur sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. 0 – 14 berjumlah 35.014 Jiwa (belum produktif),2. 15 – 64 berjumlah 87.525 Jiwa (produktif),3. 65 keatas berjumlah 6.244 Jiwa (tidak produktif), (berdasarkan data BPS, Tahun 2018), <p>Secara umum jumlah penduduk Perempuan Kota Bukittinggi lebih banyak dibanding jumlah penduduk Laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio Laki-laki yang nilainya lebih kecil dari 100 yaitu 94,44. (berdasarkan data BPS, Tahun 2018)</p> <p>Sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan terdapat 28 SKPD pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada setiap SKPD tersebut juga telah dibentuk Focal Point PUG untuk mengoptimalkan PPRG.</p> <p><u>Akses</u> Sampai saat ini, belum seluruh SKPD Kota Bukittinggi yang mengakomodir PPRG dalam program dan kegiatannya.</p> <p><u>Partisipasi</u> Jumlah PNS Fungsional di Inspektorat Kota Bukittinggi sejumlah 26 orang yang terdiri dari 5 orang P2UPD dan 21 orang Auditor.</p> <p><u>Kontrol</u> Panduan untuk melakukan pengawasan PPRG Belum ada.</p> <p><u>Manfaat</u> Pengawasan belum mampu mendorong SKPD untuk menyusun PPRG</p> <p>Berdasarkan kondisi tersebut, maka terjadi permasalahan sebagai berikut :</p> <p><u>Akses</u> Masih rendahnya jumlah SKPD yang mengakomodir Anggaran Responsif Gender di Kota Bukittinggi.</p> <p><u>Partisipasi</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Belum adanya pelatihan dan pendampingan penyusunan PPRG secara intensif dan optimal.• Belum adanya komitmen SKPD untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaannya.

	<p><u>Kontrol</u> Belum adanya panduan untuk melakukan pengawasan PPRG.</p> <p><u>Manfaat</u> Pengawasan belum mampu mendorong SKPD untuk menyusun PPRG.</p> <p>Penyebab Internal antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar SKPD belum mengetahui tentang perspektif gender, sebab itu isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius. Belum adanya panduan bagi Inspektorat untuk melakukan pengawasan PPRG. <p>Penyebab Eksternal antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum ada pendampingan penyusunan PPRG pada setiap SKPD. Belum berfungsinya Pokja PUG pada lembaga <i>driver</i> PUG maupun SKPD teknis.
--	---

Perencanaan Kegiatan	Rencana Aksi	Pengawasan PPRG	
		Tujuan	Meningkatkan jumlah SKPD yang mendukung PPRG
		Aktivitas	Melakukan Pengawasan PPRG serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga <i>driver</i> PUG Kota, Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mengoptimalkan PPRG.
		Sumber daya (Input)	Dana : Rp. 11.000.000,00 Tenaga: PNS Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Objek : Seluruh SKPD Sarana Prasarana : Dokumen Perencanaan, GAP dan GBS setiap SKPD. Laptop, ATK, dan Printer.
		Indikator Output	<u>Rumusan Kinerja :</u> Terlaksananya pengawasan PPRG. <u>Indikator Kinerja :</u> Laporan Hasil Pengawasan PPRG pada 28 SKPD.
Alokasi Sumberdaya	Anggaran	Rp. 11.000.000,00	
	SDM	10 orang, terdiri dari : 5 laki-laki, 5 perempuan	
	Peralatan	Laptop, Printer, dan ATK.	
Outcome	Rumusan Kinerja : Meningkatnya SKPD yang mendukung PPRG.		
	Indikator Kinerja : Jumlah SKPD yang mendukung PPRG sebanyak 28 SKPD.		

Juni 2019
 Inspektur Kota Bukittinggi

 AMRI, SE
 NIP. 19620311 198603 1 001



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1

KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.02.4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4.02.4.02.01 Inspektorat Kota Bukittinggi
Program : 4.02.4.02.01.17. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Kegiatan : 4.02.4.02.01.17.20 Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kota Bukittinggi
Jumlah Tahun n-1 Rp : 9.300.000,-
Jumlah Tahun n Rp : 11.000.000,-
Jumlah Tahun n + 1 Rp : 12.000.000,-

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian: Program	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	100%
Masukan	Dana	11.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan hasil pengawasan PPRG	4 Laporan
Hasil	Jumlah SKPD yang mendukung PPRG	28 SKPD

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5 2	Belanja Langsung				11.000.000
5 2 2	Belanja Barang & Jasa				11.000.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.753.500
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.753.500
	-Kertas HVS Kwarto	10	Rim	42.000	420.000
	-Kertas HVS Folio	5	Rim	43.500	217.500
	-Stop Map tebal	12	Buah	3.000	36.000
	-Map akira	4	Buah	22.500	90.000
	-Tip Ex	1	buah	8.000	8.000
	-Binder klip Besar	3	Kotak	10.000	30.000
	-Binder klip Sedang	3	Kotak	12.000	36.000
	-Pena	6	bh	6.000	36.000
	-Stabilo	12	bh	7.000	84.000
	-Catridge	1	bh	300.000	300.000
	-Tinta isi Ulang	2	Kotak	38.000	76.000
	-Map ordemer	12	buah	35.000	420.000
5 2 2 11	Belanja Makan Minum				1.710.000
5 2 2 11 03	Belanja makan dan minum Lembur				1.710.000
	- Makan lembur	45	bgks	25.000	1.125.000
	- Minum Lembur	45	porsi	13.000	585.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				7.536.500
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				7.536.500
	-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	ls	7.536.500	7.536.500
Jumlah					

Bukittinggi, Maret 2019
INSPEKTOR KOTA BUKITTINGGI
AMRI, SE
NIP. 196203111986031 004